

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial	- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) - Data Pekerjaan Masyarakat Padang Panjang berdasarkan jenis pekerjaan	Akses: - Adanya perwako yang mengatur tentang pedoman masyarakat penerima bantuan sosial dan harus terdaftar dalam DTKS - Masyarakat harus memenuhi syarat batas usia yaitu rentang usia 15 – 65 tahun Partisipasi : - Terdapat prioritas sasaran yaitu kepala keluarga, sehingga sebagian pekerja informal perempuan tidak sepenuhnya masuk dalam data	- Belum adanya kebijakan terkait tenaga kerja diatas 65 tahun karena usia tenaga kerja sudah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Adanya kebijakan yang memprioritaskan kepala keluarga karena adanya stigma bahwa hanya kepala keluarga yang mencari nafkah	- Tidak semua masyarakat memiliki akses dan/atau kesadaran untuk mengupdate data mereka seperti data pekerjaan, domisili, dan data terkait lainnya. - Masih adanya masyarakat yang gaptek dan lambat dalam menerima informasi terkait program pemerintah	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Rentan Sektor informal	- Menambahkan prioritas penerima program kegiatan pekerja sektor informal bukan hanya untuk kepala keluarga - Memberi kemudahan akses kepada masyarakat dalam mengupdate data dirinya dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perubahan data pekerjaan.	- Data pekerjaan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Input : - Anggaran Output : - Jumlah pekerja rentan sektor formal dan informal yang terdaftar perlindungan jaminan sosialnya Outcome : - Jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Kontrol : - Adanya verifikasi data di lapangan dalam upaya mengecek kebenaran data agar kegiatan tepat sasaran Manfaat : - Masyarakat yang terdata adalah masyarakat yang memiliki koneksi dengan Lembaga masyarakat/RT/RW/Kelurahan.						

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah angkatan kerja - tingkat pengangguran di kota padang panjang - kesediaan pelatihan dan lembaga penyedia pelatihan - jenis-jenis pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Akses: - Informasi terkait pengurusan AK-1 hanya dapat diakses secara online - Informasi terkait pelaksanaan pelatihan sebagian besar lebih cepat diakses pencari kerja yang memiliki koneksi terhadap informasi pemerintahan Partisipasi : - Sebagian besar pelatihan yang diadakan bersifat teknis sehingga adanya asumsi bahwa pelatihan hanya ditujukan untuk laki-laki	- Belum ada data terpilah, terkait data pencari kerja yang terbaru. - Kebijakan masih bias gender - Keterbatasan anggaran dan informasi - Masih rendahnya kebijakan terkait pengarusutamaan gender - SDM yang dimiliki masih belum memiliki kompetensi yang cukup	- Keterbatasan teknologi dan media yang dimiliki pencari kerja untuk mengakses informasi terkait pelatihan - Adanya asumsi mengikuti proses pendaftaran terlalu rumit - Masih banyaknya masyarakat yang belum melek teknologi - Belum tersosialisasi ya pembangunan teknologi informasi	Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan kerja untuk Peningkatan Kualitas Pencari Kerja di Kota Padang Panjang	- Menambah relasi kerjasama dengan lembaga pelathan kerja - Menambah Jenis Pelatihan yang diselenggarakan baik yang bersifat teknis maupun pelatihan produk seni yang dapat diikuti oleh laki-laki atau perempuan	- Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan - Jumlah Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan	Input : - Anggaran Output : - Jumlah kegiatan pelatihan Outcome : - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan instruktur serta sarana prasarana lembaga pelatihan kerja		Kontrol : - Adanya batasan kapasitas penerimaan peserta yang dapat mengikuti pelatihan. Manfaat : - Yang memanfaatkan pelatihan sebagian besar adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan informasi dan memiliki media dan teknologi.						

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan	- Jumlah masyarakat yang melakukan laporan melalui SP4N LAPOR - Jumlah pengunjung perempuan yang mengurus izin dalam jangka waktu satu tahun - Jumlah pengunjung laki-laki yang mengurus izin dalam jangka waktu satu tahun - Tingkat kepatuhan pengunjung dalam proses pengurusan izin - Statistik jenis izin yang diurus - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan perizinan	Akses : - Lokasi kantor tidak representative - Masih banyaknya masyarakat yang kurang pandai mengakses informasi secara online sehingga hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut Partisipasi : - Pada umumnya pengunjung laki-laki memiliki tingkat kesabaran dan pengetahuan yang lebih luas daripada perempuan - Adanya asumsi bahwa pegawai perizinan akan lebih sopan terhadap lawan jenisnya Kontrol :	- Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan renovasi Gedung - Masih kurangnya interaksi secara langsung kepada masyarakat dalam sosialisasi terkait pengurusan perizinan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perkembangan teknologi	- Keterbatasan teknologi dan media yang dimiliki masyarakat dalam untuk mengakses informasi terkait pengurusan perizinan dan non perizinan. - Terjadinya simpang siur informasi antar masyarakat sehingga menimbulkan kesalahan persepsi terkait instansi.	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	- Melakukan peningkatan layanan fasilitas pendukung seperti ruang menyusui, ruang bebas rokok, dan layanan ramah disabilitas. - Menyebarkan informasi terkait pengurusan perizinan dan non perizinan baik secara online maupun secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi - Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam pengurusan perizinan dan non perizinan	- Perbaikan layanan ruang menyusui, ruang bebas rokok dan fasilitas ramah disabilitas. - Jumlah kegiatan sosialisasi pengurusan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan - Jumlah media elektronik yang digunakan dalam menyebarkan informasi pengurusan perizinan dan non perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat	Input : Anggaran Output : - Perbaikan fasilitas - Jumlah kegiatan sosialisasi - Jumlah informasi publik yang diposting Outcome : - Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tujuan : Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP		- Adanya dokumen persyaratan yang harus dipenuhi pengurus dalam melakukan pengurusan perizinan - Tidak ada tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat Manfaat : - Adanya asumsi bahwa masyarakat yang memiliki akses dengan instansi pemerintah akan lebih mudah dan cepat dalam proses pengurusannya.						

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI

DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA	IRBAN WILAYAH ii PADA INSPEKTORAT	KABID ANGGARAN PADA BPKD	KABID PPPA PADA DINAS SOSIAL PPKBPPPA
 ANTONI ARIF,ST,M.CIO NIP. 19800906 201101 1 002	 YONHENDRIL,SE,Akt.Msi NIP. 19740614 199903 1 005	 LOLA OLHANA, S.E.M.Ec.Dev NIP. 19790811 200212 2 003	 FAIZIL WARDAH,S.Si,ME NIP. 19741111 200212 2 004